

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Meningkatkan program pembangunan di semua sektor dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi secara luas dan melibatkan seluruh masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah saat ini dan di masa depan. Serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi aktif warga dalam merumuskan kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. (Sandiasa dan Agustana, 2018). Perubahan dalam teknologi memerlukan perubahan dalam kepemilikan, hak akses, pembaruan informasi, serta pengambilan keputusan yang terkait, tergantung pada situasi dan waktu yang dihadapi. Karena evolusi teknologi tidak hanya menciptakan kebutuhan baru akan keahlian dan regulasi yang sesuai, tetapi juga menghadirkan peluang baru untuk mengoptimalkan proses-proses yang ada. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menghasilkan dampak yang lebih positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. (Sukoharsono, 1959).

Efektivitas menekankan aspek tujuan dari sebuah organisasi. Tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diukur melalui efektivitasnya, yaitu sejauh mana target yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi diukur dari efektivitasnya, yaitu kemampuannya dalam mencapai seluruh target yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas dilihat dari seberapa sukses organisasi dalam mencapai tujuan operatif dan operasional, yang dapat diartikan sebagai kinerja yang baik dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Serta sejauh mana organisasi mampu memperhitungkan dan mengadaptasi diri terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan

pasar, guna memastikan kelangsungan serta relevansinya di dalam konteks yang terus berubah. (Sumaryadi, 2005).

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa, seluruh SKPD di kabupaten Jember termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember tidak lagi menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), melainkan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Kebijakan ini ditetapkan pada September 2019 dengan adanya peraturan tersebut seluruh Perangkat Daerah diminta untuk menerapkan aturan yang baru.

SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah sistem informasi yang mencakup informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi sebagai jaringan untuk mengumpulkan data secara cepat dan akurat menggunakan teknologi informasi. SIPD juga dapat digunakan sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan, serta evaluasi pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan rasional. Sistem ini memungkinkan integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada setiap instansi pemerintahan (Nasution dan Nurwani, 2021).

Menurut Nasution dan Nurwani (2021) fungsi SIPD adalah untuk menampung berbagai sistem yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan lainnya, termasuk di dalamnya sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Terdapat dua hal penting disampaikan terkait dengan SIPD yaitu dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan mengelola tata kelola Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) secara baik (Saputra, 2020). SIPD memegang peran yang sangat penting dalam merespon masalah daerah secara efektif dalam perencanaan pembangunan daerah. Perkembangan partisipasi dan inklusivitas demokrasi diperlukan pada perencanaan daerah agar publik bisa secara terbuka dan transparan terlibat dalam setiap daerah. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam menjadi lebih responsif terhadap masalah daerah.

Aplikasi SIPD berbasis web memiliki 3 menu layanan informasi, yaitu informasi keuangan daerah, informasi pembangunan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya. Secara khusus, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertanggung jawab mengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah, untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang maksimal. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang telah dikelola dalam SIPD (Ruhana, 2020).

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, iaturlah pelaksanaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah dengan mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data tersebut sehingga dapat dipersembahkan kepada masyarakat sebagai informasi serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Riani et al, 2021)

Tujuan dari menerapkan aplikasi berbasis web ini adalah untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap layanan publik pemerintah, terutama di Kabupaten Jember. Namun, pelaksanaan program ini tidaklah mudah dan memerlukan kerja sama serta dedikasi yang tinggi dari setiap instansi yang terlibat. Saat pertama kali menerapkan SIPD, banyak kendala dan masalah yang dihadapi oleh beberapa instansi. Beberapa di antaranya meliputi seringnya sistem mengalami eror yang mengakibatkan pekerjaan instansi tersebut menjadi lambat, serta beberapa instansi yang lebih memilih menggunakan sistem yang lama (Vitriana et al, 2022).

Setelah dilakukan analisis melalui poin mutu yang meliputi kategori pemahaman, relevansi, keandalan, dan kemampuan untuk dibandingkan, didapati bahwa penerapan SIPD sudah terbukti efektif. Namun, penelitian sebelumnya mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa penerapan SIPD di beberapa Organisasi Perangkat Daerah masih belum sempurna. Beberapa OPD mengalami kendala dalam menerapkan aplikasi ini, termasuk kendala pada

sistem itu sendiri, sumber daya, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya (Balqis et al, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kabupaten Jember, sebuah lembaga daerah yang bergerak di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tujuan peningkatan keselarasan dan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. BAPPEDA Kabupaten Jember sudah mulai menggunakan aplikasi SIPD yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebelumnya, BAPPEDA Kabupaten Jember menggunakan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan informasi keuangan daerah. Di kutip dari ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)) SIMDA merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember Agus Cahyo menyampaikan, BAPPEDA Kabupaten Jember kerap mendapati sejumlah kelemahan pada SIPD. Seperti notifikasi yang tidak jalan, proses input yang kadang tidak tersimpan, dan kendala-kendala lain dalam proses penyusunan perencanaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember”**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan efektivitas pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, penelitian ini diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat bagi Peneliti**

Penelitian ini dijadikan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan oleh peneliti. Tujuan lainnya adalah untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

### **1.4.2 Manfaat Bagi Pembaca**

Untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan bagi para peneliti dan pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain terkait efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terutama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Jember.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya**

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang sama.

#### 1.4.4 Manfaat Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Untuk menilai tingkat efektivitas penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Jember terhadap keterlibatan dan pemanfaatan sistem tersebut oleh seluruh karyawan. Apakah dalam penggunaan sistem ini sudah berhasil memanfaatkan SIPD secara efektif dalam mendukung tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah

